

## **PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHIDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PROPERTY, REAL ESTATE, DAN BUILDING CONSTRUCTION YANG TERDAFTAR DI BEI**

**Sahril Syahrudin**

Universitas Muslim Indonesia

Email: [sahrilsyahrudin@gmail.com](mailto:sahrilsyahrudin@gmail.com)

**Muh.Su'un**

Universitas Muslim Indonesia

Email: [muhsu'un@gmail.com](mailto:muhsu'un@gmail.com)

**Darwis Lannai**

Universitas Muslim Indonesia

Email: [darwislamai@gmail.com](mailto:darwislamai@gmail.com)

### **Abstrack**

*This study examined the influence of executive compensation and executive character on the tax avoidance. Sample of this research was property, real estate and building construction industry which is listed in Indonesian Stock Exchanges during 2014-2018. This research used purposive sampling method, the number of property, real estate and building construction that were became 19 companies with 5 years observation. Hypothesis in these research were tested by multiple regression model. The result of this research showed that (1) Executive compensation has a significant effect on tax avoidance. (2) The executive character has a significant effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *executive compensation, executive character and tax avoidance*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri *property, real estate* dan *bulding contruction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurung waktu 2014-2018. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *puposive sampling*, jumlah perusahaan yang dijadikan sampel perusahaan ini adalah 19 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. (2) Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci :** Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, dan penghindaran pajak

## 1. PENDAHULUAN

Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara selain pendapatan dari Sumber Daya Alam dan pendapatan non pajak lainnya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara. Tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Namun berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban.

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014). Bagi perusahaan, pajak yang dibayar di harapkan dapat sekecil mungkin karena pajak akan mengurangi

laba bersih perusahaan. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau pun pembangunan nasional yang sebagian besar berasal dari penerimaan sektor pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Indarti, 2015). Tinggi rendahnya pembayaran pajak tergantung pada laba yang dihasilkan perusahaan sehingga dapat dikatakan laba dan pajak memiliki hubungan searah karena semakin tinggi laba semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan. Pajak dipandang sebagai beban yang harus dikurangkan, salah satu cara mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Menurut Zain (2008) *tax avoidance* adalah salah satu contoh *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan. Walaupun *tax avoidance* sering merugikan negara karena menurunkan penerimaan, pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar. *Tax avoidance* bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Mahardani dan Suardana, 2014).

Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk

mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Hanafi dan Harto, 2014). Menurut Budiman dan Setiyono (2012), Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Menurut Prebble *et al.* (2012) *tax avoidance* adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang. Sejalan dengan Prebble, Dyreng *et al.* (2008) menyatakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* akan dilakukan oleh perusahaan. Wang (2010) menyatakan *tax avoidance* adalah alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai *after tax* perusahaan meningkat.

Pernyataan bahwa eksekutif memegang peranan penting dalam menentukan skema penghindaran pajak perusahaan diperkuat oleh penelitian

yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2008) dan Budiman (2012). Peranan eksekutif tidak hanya mampu menambah nilai perusahaan tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mendukung penghindaran pajak. Pada awalnya, sulit untuk dibayangkan bagaimana eksekutif yang terdiri dari CEO, CFO dan top eksekutif lainnya memiliki peran dalam penghindaran pajak mengingat hampir tidak ada eksekutif yang benar-benar ahli dalam pajak atau bahkan memiliki latar belakang dalam bidang keuangan.

Salah satu cara yang dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian untuk mengamati sekaligus membuat skema penghindaran pajak sesuai keinginan eksekutif (Dyreng *et al.*, 2009). Budiman (2012) menyatakan semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Banyak kasus yang terjadi tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya penghindaran pajak banyak terjadi pada perusahaan global di berbagai negara di dunia. Pada Negara Uni Eropa sendiri diperkirakan penghindaran pajak merugikan keuangan anggota Uni Eropa sekitar 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HMRC (*HM Revenue and Customs*) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global.

Pertama, kasus *franchisor* kedai kopi asal Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan *franchisor* yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak PPh

(pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporan ke investor, *franchisor* menyatakan omzet selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar pounds (Rp 18 triliun). Modus *franchisor* ini dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dengan tiga cara yaitu:

1. Membayar royalti *offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda.
2. Membayar bunga utang sangat tinggi, di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain.
3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen, dan tidak masuk ke Swiss.

Kasus kedua yaitu laporan pajak perusahaan internet *search engine* kakap berbasis di AS. Perusahaan ini meraih pendapatan di Inggris 398 juta pounds pada tahun 2011, tapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian ditransfer ke cabang di Irlandia, Belanda dan berakhir di Bermuda. Negara Bermuda adalah *tax havens country* yang tidak memungut PPh badan.

Kasus ketiga, pajak bonus karyawan *investment banking* dari AS. Agar pembayaran bonus ini tidak terdeteksi, karyawan *investment banking* cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke *investment banking* cabang AS. Dengan dalih pinjaman lunak, karyawan *investment banking* cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas kecurangan ini, *investment banking* cabang Inggris harus membayar denda 500 juta pounds (Rp 7,5 triliun).

Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global di berbagai

negara. Modusnya usang tapi selalu berhasil. Modus pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Jika tarif *tax treaty* untuk pajak royalti hanya 10 persen dan tarif PPh badan adalah 25 persen, maka Indonesia kehilangan 15 persen PPh. Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan se- grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah. Modus ketiga, berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk. Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai *headquarters*) ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris dan mengalihkan *profit* ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Bermuda. Modus terakhir dengan mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.

Sementara itu di Indonesia sendiri, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, terdapat tren *profit shifting* atau pemindahan keuntungan yang marak dilakukan kalangan pengusaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan *multinasional*

*corporation* di Indonesia, banyak sekali yang melakukan praktik *profit shifting*. Sehingga membayar pajak di bawah yang seharusnya dibayar oleh mereka (Suryana, 2013).

Untuk kasus di Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan, Ditjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti menghindari pajak Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPhn-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. Harta Indra membeberkan satu kasus penghindaran pajak yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Disebutkannya, selain sanksinya sangat berat di antaranya denda mencapai 400%, proses penyelesaiannya rumit dan lama (Siregar, 2013).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan. Namun eksekutif

(direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman, 2012).

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Paligovora, 2010).

Menurut Coles, Daniel, Naveen D, Naveen dan Lalitha (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian

juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2003) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif (Hanafi dan Harto, 2014). Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penelitian terkait penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti secara ilmiah dan hasil penelitian ini masih beragam.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan tambahan jangka waktu penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan data tahun 2010-2012. Populasi dan sampel penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan sektor industri *property, real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti juga sama menggunakan sektor industri *property, real estate* dan *building construction* namun periode objeknya ditambah menjadi antara tahun 2013-2018 karena

pada saat ini sektor industri *property, real estate* dan *building construction* tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property* mengalami kenaikan. Menurut uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun. Akan tetapi setoran pajak dari sektor *property* pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun. Pertumbuhan sektor *property, real estate* dan *building construction* juga mengalami peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012. Namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti meningkatnya *effective taxes rate*. *Effective taxes rate* sebesar 29% pada tahun 2010 menurun menjadi 27% pada tahun 2012 (Hanafi dan Harto, 2014). Alasan peneliti menggunakan tambahan jangka waktu penelitian karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut jika ditambah jangka waktu penelitiannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait "Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di BEI".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing pihak yakni pemegang saham dan agen memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dimana motivasi pemegang saham adalah untuk terus

meningkatkan profitabilitas perusahaan, sedangkan agen termotivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya melalui investasi, pinjaman dan kontrak kompensasi. Tetapi, pemegang saham belum tentu dapat menjamin bahwa agen tidak akan mengambil keuntungan yang dapat merugikan pemegang saham. Pada kondisi ini, muncul konflik keagenan antara pemegang saham dan agen. Terdapat tiga konflik kepentingan antara *principle* dengan *agent*, yaitu (1) antara *stakeholders* dan manajer, (2) antara *stakeholders* dan *debtholders*, dan (3) antara *stakeholders*, *debtholders*, dan manajer (Suparlan dan Andyani, 2010).

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *Stakeholder* lainnya (Kurniasih dan Sari, 2013). Rahmawati (2008) dalam Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat diminimalkan asimetri informasi yang terjadi. Oleh karena itu laporan keuangan menjadi jembatan penghubung informasi antara pihak manajemen (*agent*) dengan pemegang saham, kreditur, dan *stakeholder* lainnya.

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran sendiri. Terjadilah *conflic of interest*. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* (Atmaja, 2008). Adanya konflik kepentingan dalam kepemilikan dapat menimbulkan biaya agensi (*agency cost*), yakni biaya yang dikeluarkan agar pihak yang diberikan wewenang dapat bertindak sesuai keinginan pemilik (Bezooyen, 2002 dalam Atmaja, 2008).

Biaya-biaya agensi misalnya sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk melakukan pengawasan (*monitoring cost*), biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mencegah agar ndakan manajer tetap sesuai dengan kepentingannya.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agar manajer tidak mengambil keuntungan dan fasilitas yang diberikan (*bonding cost*).
- 3) Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengembalikan citra perusahaan dan kesan yang buruk karena tidak tercapainya dua tujuan tersebut.

Konflik kepentingan selalu muncul kalau dua pihak mempunyai kepentingan yang berbeda (Irving, 2003 dalam Moeljadi, 2006). Perbedaan tersebut harus dikurangi agar biaya yang dikeluarkan akibat pengelolaan konflik lebih rendah. Dengan demikian akan diperoleh keuntungan sebagai berikut: Dapat menjamin kepada pemberi tugas untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi organisasi.

1. Dapat lebih mengonsentrasikan langkahnya pada program- program yang lebih konkret.
2. Dapat menaikkan nilai perusahaan secara total.

Konflik agensi tersebut harus diminimalkan dengan berbagai langkah startegis, tujuannya agar nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Nilai perusahaan yang lebih tinggi sangat diinginkan oleh keduanya, yakni pemilik dan manajer (Moeljadi, 2006).

Teori agensi dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangannya. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya alokasi yang

sisanya tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.

## 2.2 Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dyreg *et al.*, 2008), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (Cheffins dalam Solomon, 2007) dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Jika pemegang saham memandang insentif akan mengurangi biaya agensi, *stakeholder* yang lain justru memandang negatif. Misalnya reformasi kebijakan remunerasi eksekutif di Inggris, dimotivasi oleh media dan politik, bukannya oleh perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan kenaikan insentif bagi manajer tampaknya membuat pandangan publik yang buruk (Thompson dalam Solomon, 2007). Jika perusahaan mengingat reputasi dan kelangsungan bisnisnya di masa depan, maka perusahaan akan mempertimbangkan besaran kompensasi yang diberikan untuk manajer.

Standar kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus

atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya. Dasar penetapannya bervariasi, antara lain: dihitung atas dasar laba bersih tahun sebelumnya; diberikan jika realisasi laba, volume produksi, atau penjualan berada di atas anggaran yang ditetapkan RUPS; diberikan atas dasar laba sebelum pajak; atau didasarkan atas kenaikan profitabilitas dari tahun sebelumnya.

Untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara". Yang menyebutkan bahwa Persero dapat membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja meskipun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Karena adanya variasi tersebut, *bonus plan hypothesis* mungkin tidak dapat diterapkan bagi seluruh perusahaan.

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan pemberian bonus, cenderung memilih prosedur akuntansi yang mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang. Jika bonus dihitung berdasarkan laba perusahaan, maka manajer berharap dengan menaikkan laba periode sekarang, maka ia akan menerima bonus yang besar pada periode sekarang. Hal ini tidak lain karena manajer

mempertimbangkan *time value of money* dari kompensasi yang didapatnya.

Jika dasar penentuan bonus adalah laba sebelum pajak, maka manajer akan cenderung untuk bertindak oportunistik sesuai dengan *bonus plan hypothesis*. Manajer akan berusaha untuk mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang, sehingga akan menaikkan pajak penghasilan periode sekarang. Padahal salah satu cara penghindaran pajak adalah menunda pembayaran pajak periode sekarang dengan memanfaatkan beda temporer untuk mendapatkan *time value of money*. Selain itu, manajer menjadi kurang termotivasi melakukan penghematan pajak. Dalam kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kurang efektif dalam mengontrol perilaku manajer, sehingga memiliki masalah agensi lebih besar. Perusahaan yang memiliki masalah agensi lebih besar, memberikan kompensasi lebih besar kepada eksekutifnya (Core *et al.*, 1999) dan mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Lain halnya jika dasar penetapan bonus eksekutif adalah laba setelah pajak. Gaertner (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO, yang mengindikasikan bahwa CEO yang diberi kompensasi dengan dasar setelah pajak meminta adanya tambahan untuk menanggung risiko tambahan. Selain itu, CEO yang diberi kompensasi dengan dasar insentif setelah pajak memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak (Gaertner, 2011). Hal ini disebabkan manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak sehingga

mendapatkan laba bersih yang besar. Dalam kondisi ini, kepentingan manajer sama dengan kepentingan pemegang saham. Pengaruh pemberian bonus dengan skema seperti ini sama dengan pemberian opsi saham kepada manajer, yang mengatasi masalah agensi. Skema ini sering disebut sebagai kompensasi insentif, yang didesain oleh pemegang saham untuk mengontrol manajer agar sesuai dengan kepentingannya. Skema kompensasi insentif telah terbukti mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak (Armstrong *et al.*, 2013), dengan semakin besar insentif yang diberikan untuk manajer maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Minnick dan Noga, 2010 dalam Rego dan Wilson 2012).

Namun jika komponen kompensasi eksekutif hanya berupa gaji dan tunjangan, maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap kecenderungan manajer bertindak oportunistik atau bertindak memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Bervariasinya sistem penetapan kompensasi untuk masing-masing perusahaan, dan ada kalanya tidak ada penjelasan mengenai cara penetapannya, menjadi tantangan tersendiri bagi penelitian di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki sistem kompensasi yang disamakan dengan sistem perusahaan BUMN, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja.

### 2.3 Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap

pimpinan memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Pranata, 2014). Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam suatu kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman 2012).

Menurut Budiman dalam Dewi (2014) Seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012).

Menurut Hartono (2008) risiko ada kaitannya dengan *return* yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara

*outcome* yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Seorang investor akan menghadapi risiko investasi berupa kemungkinan terjadinya perbedaan hasil yang diharapkan (*expected return*) dengan hasil yang benar-benar terjadi (Penman, 2007).

Hampir senada dengan Hartono (2008), Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat *downside risk* atau *upside potential*, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligorova, 2010).

Fenomena tersebut mengindikasikan, pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan

mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif (Dewi, 2014). Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker*. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* (Dewi, 2014).

Faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan risiko pada eksekutif itu sendiri terdiri dari komitmen, tanggung jawab, kesadaran, kebijakan, metodologi, keterampilan, pemantauan.

#### 2.4 penghindaran pajak

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014).

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014), Armstrong *et al* (2012), dan

Desai dan Dharmapala (2006) bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan telaah literatur diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah

H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

H2: Karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel 2016* dan *SPSS (Statistical Package for Social Sciences)* versi 21.0. Tahapan pengujian dengan menggunakan uji regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

##### a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata

(*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan disrtibusi) (Ghozali, 2011).

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2009).

##### b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### 1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dan analisis grafik (normal P-P Plot).

##### 2) Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji adanya

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan dengan menjalankan uji Glejser pada aplikasi SPSS 20.0 dengan meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dalam (Ghozali, 2011). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang kurang dari 10% menunjukkan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas pada variabel yang diuji (Ghozali, 2011).

### 4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pegganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari angka *Durbin Watson*. Pengambilan keputusan ada dan tidaknya autokorelasi pada uji *Durbin Watson*

**Tabel 4.1**

Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (D-W)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < d \leq 4 - du$

### c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program

*Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan t-test.

#### d. Uji Hipotesis

Proposisi merupakan salah satu dari elemen teori, disamping *construct*, dan definisi, yang memberi gambaran fenomena-fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau *construct* yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris disebut dengan hipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 2009).

#### 1) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya Fhitung dengan Ftabel atau dapat pula dilakukan dengan melihat probabilitasnya. Apabila Fhitung lebih besar daripada Ftabel maka semua variabel independen berpengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian dengan nilai probabilitas yaitu apabila probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (5%) maka model diterima.

#### 2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Ghazali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini berarti terdapat pengaruh signifikan kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS 21.0 *for windows*.

#### e. Uji Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda, yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih

variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro dan Supomo, 2009). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif. Sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dimana :

$CETR$  = Cash Effective Tax Rates

(Penghindaran Pajak)

$a$  = konstanta

$kompeks$  = Kompensasi eksekutif

$kareks$  = Karakter eksekutif

$e$  = error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan property, *real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi data tentang pengaruh karakteristik eksekutif dan kompensasi eksekutif dan Penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di pada perusahaan property, *real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**

#### Analisis Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kompensasi Eksekutif	95	21	24	2179	22.93	.905
Karakter Eksekutif	95	5.298	.673	309.212	3.25487	.687821
Tax Avoidance	95	5.298	.090	164.136	1.72775	.848916
Valid N (listwise)	95					

Sumber : Data diolah spss 25

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada perusahaan yang terdaftar di perusahaan property dan real estate selama 5 tahun dalam penelitian ini sebanyak 95 data. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen Kompensasi eksekutif memiliki yang positif dengan nilai rata-rata perusahaan yang terdaftar Bursa efek indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebesar

22.93 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0.905. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen karakter eksekutif nilai rata-ratanya dari yang positif dengan nilai rata-rata adalah sebesar 3.25487 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0.687821. Hasil statistic deskriptif dari variabel independen Tax Avoidance nilai rata-rata yang positif dengan nilai rata-rata adalah sebesar

1.72775 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0.848916.

#### 4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Formula atau rumus regresi diturunkan dari suatu asumsi data tertentu. Data tidak memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan menghasilkan estimasi yang bias. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, autokorelasi,

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengujian normalitas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.

Uji Normalitas  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.55851349
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.057
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data diolah Spss versi 25

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada nilai *Unstandardized Resideul* untuk data penelitian diketahui bahwa nilai kolmogorov-smirnov z adalah 0.079 dengan nilai *Asymp.Sig.* sebesar 0,200. Hasil perhitungan menunjukkan nilai *Asymp.Sig.* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini data berdistribusi normal.

##### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas (independen). Pengujian asumsi multikolineritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Suatu model persamaan regresi dikatakan bebas dari gejala multikolineritas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10 dan nilai tolerance value-nya di atas 0,10. Hal ini akan dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompensasi Eksekutif	.994	1.007
	Karakter Eksekutif	.994	1.007

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolineritas menunjukkan nilai tolerance kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif berada diatas 0.10 dan nilai VIF berada dibawah angka 10 untu kesetiap variabel. Hasil uji multikolineritas tersebut, menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi linear berganda tidak terdapat permasalahan multikolineritas sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi ini dilakukan dengan metode Gletjser Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel inpedenden, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5.**

**Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.461	2.321		1.060	.292
	Kompensasi Eksekutif	.027	.098	.029	.274	.785
	Karakter Eksekutif	.036	.129	-.030	-.282	.778

Sumber : Data diolah spss 25

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas karena nilai probabilitasnya (sig) di atas 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Uji yang digunakan untuk mendeteksi bebas dari autokorelasi adalah Durbin Watson.

**Tabel 6.**  
**Uji Autokorelasi**

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.857427	2.925

Sumber: Data diolah spss 25

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS 25 dalam tabel di atas, diperoleh nilai Durbin Watson (DW hitung) sebesar 2,925. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada di antara Du 1720 dan (4-DU) 2,28 artinya tidak terjadi autokorelasi.

**4.3 Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Adapun berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 7.**

**Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.461	2.321		-1.060	.292
	Kompensasi Eksekutif	.027	.098	.029	3.274	.005
	Karakter Eksekutif	-.036	.129	-.030	2-2.282	.048

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.461 + 0.027X_1 - 0.036X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a = 2.461 Artinya nilai konstan untuk persamaan regresi adalah 2.461

parameter positif Hal ini berarti bahwa dengan adanya kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif maka berdampak positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *real estate* yang terdaftar di bursa Efek Indonesia sebesar 2.461.

b1 = 0.027 Artinya besar nilai koefisien regresi untuk variabel kompensasi eksekutif (b1) adalah 0.027 dengan

parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi penurunan kompensasi eksekutif sebesar 1 satuan, maka berdampak terhadap *peningkatan tax avoidance* sebesar 0.027 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.

$b_2 = -0.036$  Artinya besar nilai koefisien regresi untuk variabel karakter eksekutif ( $b_2$ ) adalah -0.036 dengan parameter negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel karakter eksekutif sebesar 1 satuan, maka tidak akan berdampak terhadap peningkatan harga saham sebesar -0.036 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.

#### 4.4 Uji Hipotesis

##### a. Analisis Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Uji t ini merupakan pengujian variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018. Adapun berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 8. Uji T Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.461	2.321		-1.060	.292
Kompensasi Eksekutif	.027	.098	.029	3.274	.005
Karakter Eksekutif	-.036	.129	-.030	2.282	.048

Sumber : Data diolah Spss 25

$$T \text{ tabel} = \frac{\alpha}{2}; n-k-1$$

$$= 0,05/2; 95-2-1$$

$$= 2,021$$

Berdasarkan Tabel 8, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

##### a) Pengaruh kompensasi eksekutif (X1) terhadap *tax avoidance* (Y)

Dari tabel diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 3.274 yang artinya t hitung sebesar 3.274 > t tabel sebesar 2,021 dan untuk taraf signifikannya 0,005 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan real

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

##### b) Pengaruh karakter eksekutif (X2) terhadap *tax avoidance* (Y)

Dari tabel diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2.262 yang artinya t hitung sebesar 2.262 > t tabel sebesar 2,021 dan untuk taraf signifikannya 0,048 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

##### b. Analisis Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semuavariabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama

(simultan) terhadap variabel dependen. Hasil pengujian F statistik diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 9. Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.105	2	.053	11.072	.000 <sup>b</sup>
	Residual	67.637	92	.735		
	Total	67.742	94			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif

Sumber : Data diolah Spss 25

F tabel =  $F_{\alpha; k-1; n-k}$   
 = 2,60

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $F_{hitung} = 11,072 > 2,60$  ( $Sig. = 0,000 < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak, artinya kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada *property, real estate* dan *home building* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018

**c. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur proporsi atau

presentasi sumbangan dari seluruh variabel bebas (X) yang terdapat dalam model regresi terhadap variabel terikat (Y). Dalam hal ini untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan dari kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* terhadap *tax avoidance* pada *property, real estate* dan *home building* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 10. Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 <sup>a</sup>	.442	.420	.857427

Sumber : Data diolah Spss 25

Berdasarkan hasil perhitungan Uji koefisien determinan seperti pada tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa pengaruh dari kedua variabel independen terhadap

variabel dependen dinyatakan dengan nilai koefisien determinan sebesar 44,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 44,2% variasi dari *tax avoidance* yang bisa dijelaskan oleh

variasi dari kedua variabel independen kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 44,2\% = 55,8\%$  dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4.5 Pembahasan

##### a. Pengaruh kompensasi eksekutif (X1) terhadap *tax avoidance* (Y)

Dari tabel diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 3.274 yang artinya t hitung sebesar  $3.274 > t$  tabel sebesar 2,021 dan untuk taraf signifikannya  $0,005 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

Faktor dari luar bisa dipengaruhi oleh kompensasi yang diberikan pemegang saham. Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi dan Sari, 2015). Dalam penelitian ini menguji apakah ada pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) menyatakan adanya pengaruh signifikan positif antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian corporate governance terhadap penghindaran pajak menjadi menarik karena dapat menjelaskan bagaimana tata kelola

perusahaan berperan dalam kepatuhan membayar pajak. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Saputra et al.,2015). Dalam penelitian ini menguji adanya pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak yang diwakili dua variabel corporate governance, yaitu dewan komisaris independen dan komite audit.

Dewan komisaris independen dan komite audit merupakan lapisan teratas dalam struktur organisasi perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan (BAPEPAM, 2004). Sedangkan komite audit terdiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota, satu diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite dan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan (BAPEPAM, 2000).

##### b. Pengaruh karakter eksekutif (X2) terhadap *tax avoidance* (Y)

Dari tabel diatas

diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2.262 yang artinya  $t$  hitung sebesar  $2.262 > t$  tabel sebesar 2,021 dan untuk taraf signifikannya  $0,048 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

Keputusan penghindaran pajak diambil oleh eksekutif perusahaan. Eksekutif perusahaan merupakan seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan dalam perusahaan. Tugas eksekutif adalah sebagai penggerak dari proses kegiatan-kegiatan dalam organisasi di perusahaan. Dalam peran mengelola perusahaan, eksekutif dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam dipengaruhi oleh tingkah laku (*attitude*) dan watak (*behavior*) yang dapat mencerminkan karakter eksekutif. Dalam penelitian ini menguji apakah ada pengaruh antara karakter eksekutif terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian Meilia dan Adnan (2017) menyatakan adanya pengaruh antara karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan property, real estate dan home building yang terdaftar secara konsisten di Bursa efek Indonesia 2014-2018.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaruh kompensasi eksekutif (X1) terhadap *tax avoidance* (Y) Dari tabel diatas diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 3.274 yang artinya  $t$  hitung sebesar  $3.274 > t$  tabel sebesar 2,021 dan untuk taraf signifikannya  $0,005 < 0,05$  artinya variabel kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Dengan demikian menyatakan bahwa semakin besar kompensasi yang diberikan pemegang saham untuk tujuan memaksimalkan nilai saham akan memberikan dampak terhadap kepatuhan eksekutif dalam membayar pajak perusahaan.
2. Dari tabel diatas diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2.262 yang artinya  $t$  hitung sebesar  $2.262 > t$  tabel sebesar 2,021 dan untuk taraf signifikannya  $0,048 < 0,05$  artinya variabel karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekutif ini termasuk tipe eksekutif risk taker karena berani memanfaatkan bunga atas hutang untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa simpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini sebagai berikut.

#### a. Saran Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan penanaman modal pada suatu perusahaan.
- 2) Bagi investor yang sedang mempertimbangkan keputusan investasi, dapat melihat karakteristik dari karakter eksekutif melalui nilai corporate risk tersebut. Perusahaan dengan corporate risk yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaannya, sekaligus memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi akibat bunga utang tersebut.
- 3) Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak serta pembuat kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat merumuskan kebijakan pencegahan atas tindakan agresifitas pajak tersebut.

#### b. Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya agar menguji kembali pengaruh karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, dan menambah variabel lain seperti dewan komisaris independen, komite audit, dan financial distress.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adi, Anindyarta Wardhana dan Nur Cahyonowati. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko". Diponegoro Journal of

Accounting, Vol. 2, No. 3, Halaman 1-14. 2013.

Amstrong, Christopher. S., Jenniver L. Blouin, Alan D. Jagolinzer dan David F.Larcker. " Corporate Governance, Incentives and Tax Avoidance". Rock Center for Corporate Governance Working Paper Series no. 136. 2013.

Andayani, Wuryan dan Suparlan. "Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit". Simposium Nasional Akuntansi XIII. 2010.

Annisa, N.A dan Lulus Kurniasih. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance." Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol 8 No 2 ISSN 1412-6699 (2012), h 95-189. 2012.

Armstrong, C.S., J.L. Blouin, dan D.F. Larcker. "The Incentives for Tax Planning." Journal of Accounting and Economics 53 (2012), h. 391-411. 2012.

Atmaja, Lukas Setia. "Teori dan Praktik Manajemen Keuangan". Jakarta Penerbit Andi. 2008. Budiman, Judi, dan Setiyono. "Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak" (Tax Avoidance). SNA XV. 2012.

Coles, Jeffrey L., Daniel, Naveen D., Naveen, Lalitha. "Managerial Incentive and Risk Taking" The Accounting Review. 2004.

Core John E., Robert W. Holthausen, David F. Larcker. "Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance". Journal of

- Financial Economics 51 (1999) 371-406. 1999.
- Desai, M.A. dan D. Dharmapala. "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives." *Journal of Financial Economics* 79 (2006), h. 145-179. 2006.
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita dan Maria M. Ratna Sari. "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1 (2014): 50-67. 2015. 74
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2 (2014): 249-260. 2014.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. "Long Run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 83, 61-82. 2008.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189. 2010.
- Gaertner, F.B. "CEO After-tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance". *The University of Arizona*. 2011.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19", Edisi Kelima Cetakan Kelima, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2011.
- Hamid, Abdul. "Buku Panduan Penulisan Skripsi", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2012.
- Hanafi, Umi dan Harto, Puji "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan" *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3*, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1- 13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806. 2014.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, "Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen", Salemba Empat, Yogyakarta, 2009.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi* Vol 18, No.1 Februari. 2013.
- Kusuma, Rahmat D. "Berpotensi Lakukan Penghindaran Pajak, 40% Pengembang Real Estate Perlu Diperiksa". [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com) diakses pada tanggal 15 Januari 2015, 10.06 WIB. 2013.
- Lanis, R. dan G. Richardson. "The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness." *Journal of Accounting & Public Policy* 30 (2011), h. 50-70. 2011. 75
-

- Lewellen, Katharina. "Financing Decisions When Managers Are Risk Averse". Working Paper, Mit Sloan School of Management. 2003.
- Minnick, K. dan T. Noga. "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?" *Journal of Corporate Finance* 16 (2010), h. 703-718. 2010.
- Moeljadi. "Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif". Jilid 1, Edisi 1, Bayumedia Publishing, Malang. 2006.
- Pohan, H.T. "Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik." *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik* Vol.4, No.2 Juli 2009 Hal 113- 135. 2008.
- Poligovora, Teodora. "Corporate Risk Taking and Ownership Structure". Bank of Canada Working Paper. 2010.
- Puspita, Slivia Ratih dan Harto, Puji. . Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806. 2014.
- Republik Indonesia, Perdirjen No. Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Rego, Sonja O. "Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations." *Contemporary Accounting Research* 2014):805-833.
- Rego, Sonya O, dan Ryan Wilson. "Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance". Working Paper. 2008.
- Rego, Sonja O. dan Wilson, Ryan J. "Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness". *Journal of Accounting Research* (December 2012), Forthcoming. 2012.
- Sabli, N. dan R.M. Noor. "Tax Planning and Corporate Governance." 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding, 2012.
- Siregar, Sarsin. "Ditjen Pajak Temukan 7 Modus Penghindaran Pajak Properti". [http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen\\_pajak\\_temukan\\_7modus\\_penghindaran\\_pajak\\_properti/#.Vc4BBat\\_IU](http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen_pajak_temukan_7modus_penghindaran_pajak_properti/#.Vc4BBat_IU) diakses pada tanggal 15 Januari 2015, 10.06 WIB 76
- Suryana, Anindita Budi. "Menisik Pajak Perusahaan Global". <http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia> diakses pada tanggal 15 Januari 2015, 09.46 WIB
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales
-

Growth pada Tax avoidance". E  
Jurnal Akuntansi Universitas  
Udayana 10.1 (2015): 47-62.  
2015..

Xynas, L. "Tax Planning, Avoidance  
and Evasion in Australia 1970-  
2010: The Regulatory  
Responses and Taxpayer  
Compliance". Revenue Law  
Journal Vol.20 Issue.1. 2011.